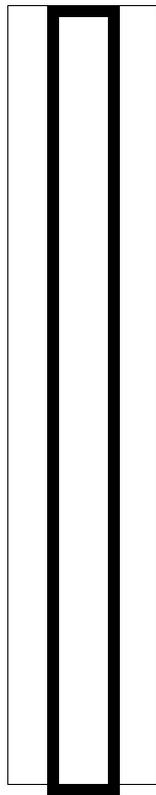




PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA-PD)
TAHUN 2024**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MINAHASA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUAEGA BERENCANA TAHUN 2023
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan
2.3	Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5	Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
BAB III	TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024
3.1	Telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi
3.2	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3	Rumusan Program dan Kegiatan tahun 2024
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD
BAB V	PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju. Kebijakan Program dan Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2024 dituangkan dalam Renja Tahun 2024. Sebagai dokumen rencana pembangunan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Minahasa tahun 2005-2025 seperti yang tertuang dalam dokumen perencanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja (RENJA) ini dimaksudkan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD. Pada RENJA ini digambarkan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Visi Misi Kabupaten Minahasa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa ditujukan untuk memberikan pelayanan prima secara sistematis dalam program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana(Bangga Kencana) baik dari segi kuantitas maupun dari segi peningkatan kualitas pelayanan serta pemerataan pelaksanaan program Bangsa Kencana yang diberikan kepada masyarakat dengan memenuhi standar yang telah ditetapkan baik pelayanan yang bersifat subsidi maupun mandiri sesuai dengan kemampuan masyarakat dan mudah dijangkau.

Pengembangan Program pelayanan Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana(Bangga kencana) ditujukan untuk mempercepat proses perubahan pandangan, sikap dan perilaku masyarakat yang positif terhadap program Bangsa kencana,yang selanjutnya harus diikuti dengan perencanaan kegiatan serta penyiapan sarana pelayanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Pengembangan program bangga kencana dimaksud, baik yang dikelola oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan program Bangsa kencana ditujukan untuk memperkuat dan mengembangkan manajemen/jejaring pelayanan serta kelembagaan program disemua tingkatan wilayah. Kuatnya jejaring dan jaringan, mantapnya mekanisme operasional yang didukung sistem pencatatan dan pelaporan secara akurat dengan sumberdaya manusia yang handal akan mempercepat perwujudan visi Misi Kabupaten Minahasa.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja PD merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang relevan dalam penyusunan RENJA PD lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa masing-masing:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah;
 32. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024
 33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021;
 35. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2028;
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tahun 2014-2034;
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 – 2023;
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Minahasa nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023;
 41. Peraturan Bupati Minahasa nomor 54 tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
 42. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Minahasa disusun dengan maksud memberikan arah dalam pencapaian sasaran hasil pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Adapun tujuan Rencana Kerja ini adalah untuk memasukan program/kegiatan/sub kegiatan yang ada ke dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.

Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026. Renstra yang berlaku untuk periode tiga tahun dijabarkan dalam Renja setiap tahunnya dengan mempertimbangkan isu-isu strategis serta kebutuhan masyarakat yang berkembang. Dalam Renja juga diakomodir masukan yang diperoleh dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 diarahkan untuk pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Ketercapaian Visi dan Misi tersebut sangat tergantung pada pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya, yang juga akan berpengaruh pada pencapaian pembangunan daerah.

Penyusunan RENJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2024 dimaksudkan agar para aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki pedoman yang jelas tentang tahapan pembangunan bidang pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Minahasa pada Tahun Anggaran 2024. Karena itu, pada RENJA 2024 ini terangkum rencana program, kegiatan, sub kegiatan, rencana anggaran, dan indikator pencapaian program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa tahun 2024-2026 ;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan:

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MINAHASA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra SKPD

2.1.1 Evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2023

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Minahasa memiliki Tujuan Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas juga Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM aparatur yang berkinerja tinggi serta memiliki sasaran strategis mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan pembinaan keluarga berencana, meningkatkan pemberdayaan keluarga sejahtera dan Meningkatkan kualitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bersih, akuntabel dan profesional. Dengan Penggunaan Alat Kontrasepsi, laju pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang sehingga ketahanan dan kesejahteraan keluarga meningkat/berkualitas. Untuk memantapkan perencanaan pembangunan Daerah tahun 2024 diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023. Evaluasi Renja tahun 2023 dan capaian Renstra atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan PD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan(LAKIP) PD. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa. Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya Sasaran pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Berikut ini adalah Hasil Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 terkait pencapaian target Renstra Perangkat Daerah :

**Tabel 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d tahun 2023**

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes)/Kegiatan Output)	Target Kinerja capaian program sampai tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran s/d tahun 2021	Tahun 2023			Target program dan kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target sampai dengan Tahun 2024	
					Target	Realisasi	%		Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14.02	Program pengendalian penduduk	Angka Kelahiran Total (Total fertility Rate/TFR)	2,1	2,08	2,08	2,02	97,115385	2,09	2,09	100%
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK yang di-Perdakan	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	26	23	28	2,9	10,357143	26	26	100%
2.14.02.2.02.13	pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah Dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	2 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.14.03	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence	81,54%	80,34%	80,74%	59,18%	73,297003	81,14%	81,14%	100%

		Rate/mCPR)								
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15%	16,96%	16%	30,45%	52,545156	15,75%	15,75%	100%
2.14.03.3.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	6	-	6	5	83,333333	6	6	100%
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah unit sarana penyediaan dan dan pendistribusian KIE program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	0	0	0%
2.14.03.2.01.04	promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah dokumen promosi dan KIE program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	2 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rekorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan mekanisme operasional program Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) melalui rapat koordinasi kecamatan (Rajorcam), rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini lokakarya (Minilok)	125 Laporan	-	25 Laporan	25 Laporan	100	25 Laporan	25 Laporan	100

2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di balai penyuluhan KKBPBPK	Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana)	102 Laporan	20 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	100	25 Laporan	25 Laporan	100
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPBPK (advokasi dan KIE)	37,5%	24,72%	37%	2,15%	5,8108108	37,5%	37,5%	100%
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia	64 Unit	-	25 Unit	25 Unit	100	25 Unit	25 Unit	100
2.14.03.2.02.04	Penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1470 Kader	1470 Kader	1470 Kader	1470 Kader	100	1470 Kader	1470 Kader	100%
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	32%	31,60%	31,50%	54,86%	174,15873	32%	32%	100%
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan pengendalian distribusi alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3901	-	1212 Orang	1113 Orang	91,831683	1576 Orang	1576 Orang	100%
2.14.03.2.03.06	Penyediaan sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	18 Unit	12 Unit	3 Unit	3 Unit	100	3 Unit	3 Unit	100%

2.14.03.2.03.08	pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah laporan hasil pembinaan pel.KB dan kespro di faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	3 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	7	3	5	5	100	7	7	100%
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) di kampung KB	45 Kampung KB	25 Kampung KB	45 Kampung KB	45 Kampung KB	100	45 Kampung KB	45 Kampung KB	100
2.14.04	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100%	51%	80%	65%	81,25	100%	100%	100%
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ber-KB	90%	87%	88%	83%	94,318182	90%	90%	100%
2.14.04.2.01.02	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	75 Unit	0	10 Unit	10 Unit	100	25 Unit	25 Unit	100%

2.14.04.2.01.05	Penyediaan biaya operasioanal bagi pengelola dan pelaksanaan (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah kader pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	810 Kader	0	810 Kader	810 Kader	100	810 Kader	810 Kader	100%
2.14.01.2.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4	4	4	4	100	4	4	100%
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan keuangan yang ditetapkan/disahkan dan didistribusikan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	37 Org	26 Org	16 Org	16 Org	100	37 Org	37 Org	100%
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum peranghkat daerah yang terfasilitasi	99%	96%	97%	44,07%	45,43299	98%	98%	100%
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	12 Paket	100%
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	12 Paket	100%
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat operasionalisasi perkantoran tahunan	100%	94%	96%	96%	100	98%	98%	100%
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100%

2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/laik fungsi	93%	80%	91%	90,00%	98,901099	91%	91%	100%
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100%
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	2 Unit	4 Unit	4 Unit	100	5 Unit	5 Unit	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan Keluarga Berencana.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2022	2023	2024	2025	2023	2024	2024	2025	
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,2	1	1	1	1	1	1	1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) rendah, sebaiknya LPP 1 untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,09	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	-
3	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	81,14%	81,54%	81,20%	81,24%	81,54%	81,20%	81,20%	81,24%	Tidak semua faskes melakukan pelaporan di new siga
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15,75%	15%	15%	15,00%	15%	15%	15%	15,00%	Adanya PUS yang takut menggunakan KB, merasa tidak cocok dan juga karena faktor adat budaya
5	Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	80%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	80%	1. Terdapat/adanya kelompok kegiatan yang tidak melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga karena kurangnya referensi tentang 8 fungsi keluarga 2. Kurangnya pendampingan dari petugas lapangan

6	Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK yang di-Perdakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	Dikumen GDPK sudah selesai dibuat, rencana diperdakan tahun 2025
7	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	28	26	24	22	26	24	24	22	-
8	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	5	7	5	7	7	5	5	7	-
9	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	6	6	6	7	6	6	6	7	-
10	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	37%	37,5%	13%	14%	37,5%	13%	13%	14%	Jumlah PLKB yang masih kurang tidak seimbang tidak sesuai rasio 1 PLKB per Desa/Kelurahan
11	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	31,5%	32%	60%	65%	32%	60%	60%	65%	-
12	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	77,61%	79,1%	35%	45%	79,1%	35%	35%	45%	-
13	Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	29,49%	32,42%	62%	65%	32,42%	62%	62%	65%	Tidak semua faskes melakukan pelaporan di new siga

14	Persentase Kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	34,62%	31,11%	12%	11%	31,11%	12%	12%	11%	-
15	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	41,68%	45,97%	20,58%	21,58%	45,97%	20,58%	20,58%	21,58%	Kurangnya peserta KB Penerima Bantuan Iuran (PBI)
16	Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ber-KB	88%	90%	90,5%	92%	90%	90,5%	90,5%	92%	Masih ada anggota poktan dan UPPKA yang masih status PUS tetapi tidak ber-KB
17	Median Usia kawin pertama(MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun	21	21	22	22	21	22	22	22	-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

A. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD

Hasil analisis isu strategis selanjutnya dipadukandengan batasan tugas dan peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa makahambatan dan masalahyang dihadapi adalahsebagai berikut :

Tabel. 2.3.1 Hambatan dan Masalah

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (Kewenangan SKPD)	EKSTERNAL (Diluar Kewenangan SKPD)	
Jumlah Balai Penyuluhan KB Kecamatan	80%	Persentase Balai Penyuluhan KB Kecamatan yang beroperasi aktif			- Belum semua kecamatan memiliki Balai Penyuluhan KB
Perbandingan jumlah petugas Lapangan KB (PLKB) dengan luas wilayah pelayanan	12 PLKB	Jumlah Peserta KB Aktif		Ratio Petugas PLKB dan PKB	- Luas Wilayah pelayanan yang tidak sesuai dengan jumlah petugas PLKB dan PKB di Lapangan 1 petugas lapangan melayani 270 desa/Kel (jumlah PLKB 8 orang dari 270 desa/Kel)

<p>Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Pembangunan Keluarga Kependudukan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan</p>			<p>Kurangnya komitmen dan dukungan dari pemangku kepentingan</p>		<p>(1) Masih lemahnya komitmen dan dukungan para pemangku kepentingan terhadap Bangga Kencana terutama yang terkait kebijakan, perencanaan program dan penganggaran; (2) Masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program Bangga Kencana baik antar Kecamatan, Kelurahan/desa (3) Muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE masih perlu untuk terus dikembangkan; (4) Peran Tenaga lapangan KB/PLKB dalam konseling KB belum optimal.</p>
<p>Pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian Ibu melahirkan</p>					<p>(1) Angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun masih tinggi; (2) Masih banyaknya perkawinan usia muda; (3) Tingginya perilaku seks pra nikah disebagian kalangan remaja, berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi; (4) Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah.</p>

<p>Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada beberapa permasalahan</p>					<p>(1) Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga; (2) Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB. Disamping itu, kelompok kegiatan (Poktan), yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya berKB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA); (3) Terbatasnya materi program Bangga Kencana dalam kelompok kegiatan serta terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan.</p>
--	--	--	--	--	---

Pelaksanaan Tugas-tugas Kantor					<p>Dengan banyaknya tugas-tugas yang dilaksanakan pada Dinas Pengendalian penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa diperlukan Pegawai-pegawai yang profesional dan proporsional dalam melaksanakan tugasnya dan berpengalaman untuk mencapai kelancaran Tugas Dinas</p> <p>b. Penempatan pegawai yang kurang sesuai dengan kompetensi atau dengan bidang tugasnya. Dan seluruh pegawai diharapkan memahami Tupoksi sehingga dapat mengimplementasikannya dalam pekerjaan sehari-hari.</p>
--------------------------------	--	--	--	--	---

B. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

Faktor kunci keberhasilan dari suatu organisasi pemerintah atau instansi, tergantung kepada sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan juga dukungan dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang melingkupinya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa.

Tabel. 2.3.2 Tantangan dan Peluang

PERMASALAHAN	TANTANGAN	PELUANG
Luas Wilayah Garapan yang tidak Sesuai dengan Jumlah Petugas PLKB di Lapangan (1 : 270)	Keterbatasan / Kurangnya tenaga Penyuluh KB dilapangan sehingga perlu penambahan pegawai sebagai Tenaga Lapangan	-Menanggulangi kekurangan PLKB dengan PLKB non PNS -Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, serta optimalisasi fungsi PPKBD dan Sub-PPKBD (Kader) sebagai ujung tombak pelaksanaan Program Bangga Kencana di lini lapangan.
Banyaknya kelompok kegiatan bagi peningkatan ketahanan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui UPPKS (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang	Kurangnya Melakukan pelatihan dan pendampingan kelompok TriBina dan UPPKS	- Adanya upaya kemitraan dengan stakeholder terkait -Memanfaatkan Dana DAK Non Fisik (BOKB)

memerlukan pendampingan kelompok dan pelatihan		
Tupoksi Pegawai	Dalam Penyelenggaraan tugas-tugas dilihat dari unsur penunjang yang ada yaitu unsur Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. minahasa kalau dilihat dari segi Profesional dan Proporsional dirasakan masih kurang didalam melaksanakan tugasnya dikarenakan keterbatasan pegawai dan kurangnya pemahaman pegawai tentang TUPOKSI.	Penambahan Pegawai

Dari tabel hambatan dan masalah serta tantangan dan peluang dapat ditentukan isu-isu penting yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas dalam meningkatkan Pembangunan Keluarga pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di tahun 2024 antara lain melalui:

- 1) Ketersediaan instrumen regulasi yang mendukung penguatan program dan kegiatan Bidang Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan dan KB ke dalam program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- 2) Ketersediaan rancang bangun program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, KB (Bangga Kencana) yang tertuang dalam Arah Kebijakan Umum Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten);
- 3) Penguatan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan KB di Tingkat Kabupaten;
- 4) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota, serta optimalisasi fungsi PPKBD dan Sub-PPKBD (Kader) sebagai ujung tombak pelaksanaan Program Bangga Kencana di lini lapangan;
- 5) Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi melalui kegiatan prioritas :
 - a. Pelayanan KB;
 - b. Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana;
 - c. Pembinaan Remaja;
 - d. Pembangunan Keluarga
 - e. Regulasi, Kelembagaan serta Data dan Informasi.
 - f. Adanya sumber daya manusia (SDM) aparatur yang memadai baik di tingkat Kabupaten dan Kecamatan (PKB/PLKB)
 - g. Jejaring kemitraan lintas sektoral

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Hasil analisis kebutuhan terdapat perubahan terhadap rancangan awal RKPD. Rancangan awal tidak memenuhi Bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) dan pengadaan sarana dan prasarana program KB bagi PKB/PLKB yang berperan penting dalam sasaran strategis meningkatkan tingkat kesertaan ber-KB, sehingga atas hal tersebut dalam hasil analisis bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) dan pengadaan sarana dan prasarana program KB bagi PKB/PLKB di tambahkan sebagaimana table berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Juta Rp	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Juta Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	61	Rp 410.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	61	Rp 410.000.000	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK yang di-Perdakan)	1	Rp 45.000.000	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK yang di-Perdakan)	1	Rp 45.000.000	
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	DPPKB	Jumlah laporan rapat pengendalian program bangga kencana (pembangunan keluarga , kependudukan, dan keluarga berencana)	12 Lap	Rp 45.000.000	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	DPPKB	Jumlah laporan rapat pengendalian program bangga kencana (pembangunan keluarga , kependudukan, dan keluarga berencana)	12 Lap	Rp 45.000.000	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	24	Rp 365.000.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	24	Rp 365.000.000	
2.14.02.2.02.08	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	Minahasa	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	12 Lap	Rp 100.000.000	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	Minahasa	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	12 Lap	Rp 100.000.000	
2.14.02.2.02.12	pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Minahasa	jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	12 Lap	Rp 90.000.000	pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Minahasa	jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	12 Lap	Rp 90.000.000	

2.14.02.2.02.13	pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Minahasa	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	1 Dok	Rp 150.000.000	pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Minahasa	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	1 Dok	Rp 150.000.000	
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK	Minahasa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan	1 Lap	Rp 25.000.000	Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK	Minahasa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan	1 Lap	Rp 25.000.000	
02.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	14,93%	Rp 5.169.037.873	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	14,93%	Rp 5.169.037.873	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	6	Rp 1.695.000.000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	6	Rp 1.695.000.000	
2.14.03.2.01.1	Advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	Fasyankes	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) kepada stakeholders dan mitra kerja	6	Rp 100.000.000	Advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	Fasyankes	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) kepada stakeholders dan mitra kerja	6	Rp 100.000.000	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	DPPKB	Jumlah dokumen komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) sesuai kearifan budaya lokal	1 Dok	Rp 25.000.000	Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	DPPKB	Jumlah dokumen komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) sesuai kearifan budaya lokal	1 Dok	Rp 25.000.000	

2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Minahasa	Jumlah unit sarana penyediaan dan pendistribusian KIE program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana)	1 Unit	Rp 10.000.000	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Minahasa	Jumlah unit sarana penyediaan dan pendistribusian KIE program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana)	1 Unit	Rp 10.000.000	
2.14.03.2.01.04	promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Minahasa	Jumlah dokumen promosi dan KIE program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	1 Dok	Rp 100.000.000	promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Minahasa	Jumlah dokumen promosi dan KIE program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	1 Dok	Rp 100.000.000	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rekorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	25 Kecamatan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rekorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	25 Lap	Rp 510.000.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rekorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	25 Kecamatan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rekorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	25 Lap	Rp 510.000.000	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di balai penyuluhan KKBPK	20 Balai Penyuluhan KB	Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana)	25 Lap	Rp 850.000.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di balai penyuluhan KKBPK	20 Balai Penyuluhan KB	Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana)	25 Lap	Rp 850.000.000	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian program KKBPK	Minahasa	Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK	12 Lap	Rp 100.000.000	Pengendalian program KKBPK	Minahasa	Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK	12 Lap	Rp 100.000.000	

2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	13%	Rp 1.591.000.000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	13%	Rp 1.591.000.000	
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	25 Kecamatan	Jumlah organisasi yang mengikuti pembinaan IMP dan program Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) di lini lapangan oleh PKB/PLKB	25 Organisasi	Rp 250.000.000	Pembinaan IMP dan program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	25 Kecamatan	Jumlah organisasi yang mengikuti pembinaan IMP dan program Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) di lini lapangan oleh PKB/PLKB	25 Organisasi	Rp 250.000.000	
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kecamatan	Jumlah Sarana Pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia	3 Unit	Rp 30.000.000	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kecamatan	Jumlah Sarana Pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia	3 Unit	Rp 30.000.000	
2.14.03.2.02.03	Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	Minahasa	Jumlah laporan hasil Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	1 Lap	Rp 15.000.000	Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	Minahasa	Jumlah laporan hasil Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	1 Lap	Rp 15.000.000	
2.14.03.2.02.04	Penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Minahasa	Jumlah kader yang mengikuti penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1470 Kader	Rp 1.296.000.000	Penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Minahasa	Jumlah kader yang mengikuti penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1470 Kader	Rp 1.296.000.000	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	60%	Rp 635.888.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	60%	Rp 635.888.000	

2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	<i>Fasilitas kesehatan</i>	Jumlah laporan pengendalian distribusi alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	12 Lap	Rp 35.150.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	<i>Fasilitas kesehatan</i>	Jumlah laporan pengendalian distribusi alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	12 Lap	Rp 35.150.000	
2.14.03.2.03.02	Peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB	<i>Minahasa</i>	Jumlah pengelola dan petugas alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang yang mengikuti peningkatan kompetensi	2 Org	Rp 10.000.000	Peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB	<i>Minahasa</i>	Jumlah pengelola dan petugas alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang yang mengikuti peningkatan kompetensi	2 Org	Rp 10.000.000	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	<i>Minahasa</i>	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1593 org	Rp 359.238.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	<i>Minahasa</i>	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1593 org	Rp 359.238.000	
2.14.03.2.03.04	Penyediaan dukungan dan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	<i>Minahasa</i>	Jumlah laporan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	1 Lap	Rp 10.000.000	Penyediaan dukungan dan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	<i>Minahasa</i>	Jumlah laporan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	1 Lap	Rp 10.000.000	
2.14.03.2.03.05	Penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) dan sarana penunjang pelayanan KB	<i>Minahasa</i>	Jumlah dokumen penyusunan Penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) dan sarana penunjang pelayanan KB	1 Dok	Rp 1.500.000	Penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) dan sarana penunjang pelayanan KB	<i>Minahasa</i>	Jumlah dokumen penyusunan Penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) dan sarana penunjang pelayanan KB	1 Dok	Rp 1.500.000	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan sarana Penunjang Pelayanan KB	<i>Faskes dan Poktan</i>	Jumlah unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Unit	Rp 30.000.000	Penyediaan sarana Penunjang Pelayanan KB	<i>Faskes dan Poktan</i>	Jumlah unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Unit	Rp 30.000.000	
2.14.03.2.03.07	Pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB	<i>Minahasa</i>	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB	68 Org	Rp 25.000.000	Pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB	<i>Minahasa</i>	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB	68 Org	Rp 25.000.000	
2.14.03.2.03.08	pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Faskes	Jumlah laporan hasil pembinaan pel.KB dan kespro di faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	4 Laporan	Rp 25.000.000	pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Faskes	Jumlah laporan hasil pembinaan pel.KB dan kespro di faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	4 Laporan	Rp 25.000.000	

2.14.03.2.03.09	Promosi dan konseling kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan	Minahasa	Jumlah orang yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan	100 Org	Rp 25.000.000	Promosi dan konseling kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan	Minahasa	Jumlah orang yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan	100 Org	Rp 25.000.000	
2.14.03.2.03.10	Peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Minahasa	Jumlah tenaga pelayanan yang mengikuti peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	68 Org	Rp 60.000.000	Peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Minahasa	Jumlah tenaga pelayanan yang mengikuti peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	68 Org	Rp 60.000.000	
2.14.03.2.03.11	Dukungan operasional pelayanan KB bergerak	Minahasa	Jumlah laporan dukungan operasional pelayanan KB bergerak	1 Lap	Rp 20.000.000	Dukungan operasional pelayanan KB bergerak	Minahasa	Jumlah laporan dukungan operasional pelayanan KB bergerak	1 Lap	Rp 20.000.000	
2.14.03.2.03.12	Promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran	Minahasa	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran	50 Org	Rp 20.000.000	Promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran	Minahasa	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran	50 Org	Rp 20.000.000	
2.14.03.2.03.13	Peningkatan kesertaan KB Pria	Minahasa	Jumlah akseptor yang mendapat peningkatan kesertaan KB pria	1 Lap	Rp 15.000.000	Peningkatan kesertaan KB Pria	Minahasa	Jumlah akseptor yang mendapat peningkatan kesertaan KB pria	1 Lap	Rp 15.000.000	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	5	Rp 1.247.149.873	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	5	Rp 1.247.149.873	
2.14.03.2.04.01	Penguatan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Minahasa	Jumlah organisasi yang mendapatkan penguatan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	68 Faskes	Rp 25.000.000	Penguatan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Minahasa	Jumlah organisasi yang mendapatkan penguatan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	68 Faskes	Rp 25.000.000	

2.14.03.2.04.02	Integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	Minahasa	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	1 Dok	Rp 300.000.000	Integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	Minahasa	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	1 Dok	Rp 300.000.000	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Minahasa	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) di kampung KB	45	Rp 798.749.873	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Minahasa	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) di kampung KB	45	Rp 798.749.873	
2.14.03.2.04.04	Pembinaan terpadu Kampung KB	Minahasa	Jumlah laporan hasil pembinaan terpadu kampung KB	1 Lap	Rp 123.400.000	Pembinaan terpadu Kampung KB	Minahasa	Jumlah laporan hasil pembinaan terpadu kampung KB	1 Lap	Rp 123.400.000	
02.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	80%	Rp 2.144.692.127	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	80%	Rp 2.144.692.127	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	90,5%	Rp 2.119.692.127	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	90,5%	Rp 2.119.692.127	
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Minahasa	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	15 unit	Rp 200.000.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Minahasa	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	15 unit	Rp 200.000.000	
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Oprasional bagi Pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Minahasa	Jumlah kader pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	810 Kader TPK	Rp 1.919.692.127	Penyediaan Biaya Oprasional bagi Pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Minahasa	Jumlah kader pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	810 Kader TPK	Rp 1.919.692.127	

2.14.01.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Median Usia kawin pertama(MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun	22	Rp 25.000.000	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Median Usia kawin pertama(MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun	22	Rp 25.000.000	
2.14.01.2.02.03	Pelaksanaan peningkatan kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Minahasa	Jumlah organisasi yang mengikuti peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	25 Organisasi dan mitra kerja	Rp 25.000.000	Pelaksanaan peningkatan kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Minahasa	Jumlah organisasi yang mengikuti peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	25 Organisasi dan mitra kerja	Rp 25.000.000	
02.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai SAKIP	BB	Rp 2.263.076.659	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai SAKIP	BB	Rp 2.263.076.659	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4	Rp -			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4	Rp -	
2.14.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang ditetapkan	9 Dok	Rp 6.000.000	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang ditetapkan	9 Dok	Rp 6.000.000	
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPPKB	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dok	Rp 3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPPKB	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dok	Rp 3.000.000	
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPPKB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Lap	Rp 1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPPKB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Lap	Rp 1.500.000	
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPPKB	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Lap	Rp 1.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPPKB	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Lap	Rp 1.500.000	

2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	100%	Rp 2.016.001.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	100%	Rp 2.016.001.000	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPKB	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35 org	Rp 2.011.501.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPKB	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35 org	Rp 2.011.501.000	
2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPPKB	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Lap	Rp 1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPPKB	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Lap	Rp 1.500.000	
2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	DPPKB	Jumlah laporan/ keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD	4 Lap	Rp 1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	DPPKB	Jumlah laporan/ keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD	4 Lap	Rp 1.500.000	
2.14.01.2.02.08	Penyusunan pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPPKB	Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dok	Rp 1.500.000	Penyusunan pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPPKB	Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dok	Rp 1.500.000	
2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Teradministrasi	94%	Rp 1.100.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Teradministrasi	94%	Rp 1.100.000	
2.14.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik Daerah SKPD	DPPKB	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dok	Rp 500.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik Daerah SKPD	DPPKB	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dok	Rp 500.000	
2.14.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPPKB	Jumlah Laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	4 Lap	Rp 600.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPPKB	Jumlah Laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	4 Lap	Rp 600.000	
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terasilitasi	99%	Rp 20.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terasilitasi	99%	Rp 20.000.000	
2.14.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	DPPKB	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	Rp 20.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	DPPKB	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	Rp 20.000.000	

2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi	100%	Rp 73.025.659	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi	100%	Rp 73.025.659	
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPKB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	Rp 1.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPKB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	Rp 1.000.000	
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp 19.025.659	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp 19.025.659	
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPPKB	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	Rp 1.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPPKB	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	Rp 1.000.000	
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPPKB	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	Rp 1.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPPKB	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	Rp 1.000.000	
2.14.01.2.06.08	fasilitas Kunjungan Tamu	DPPKB	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Lap	Rp 1.000.000	fasilitas Kunjungan Tamu	DPPKB	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Lap	Rp 1.000.000	
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPKB	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	Rp 50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPKB	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	Rp 50.000.000	
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	94%	Rp 33.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	94%	Rp 33.000.000	
2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	DPPKB	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10 Unit	Rp 18.000.000	Pengadaan Mebel	DPPKB	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10 Unit	Rp 18.000.000	
2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPPKB	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Unit	Rp 15.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPPKB	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Unit	Rp 15.000.000	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98%	Rp 87.950.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98%	Rp 87.950.000	
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	Rp 4.700.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	Rp 4.700.000	

2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	Rp 17.250.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	Rp 17.250.000	
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPPKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Lap	Rp 66.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPPKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Lap	Rp 66.000.000	
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBM	94%	Rp 26.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBM	94%	Rp 26.000.000	
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPPKB	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 6.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPPKB	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 6.000.000	
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPKB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Rp 20.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPKB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Rp 20.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan didapatkan dari hasil Musrenbang maupun usulan lainnya dari masyarakat. Usulan yang datang dari masyarakat pada umumnya terkait dengan pembangunan fisik serta pengadaan sarana lainnya sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel. 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/	Catatan
				Volume	
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Prioritas pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Minahasa tahun 2024 yang ditetapkan selain untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan Kabupaten Minahasa juga untuk mendukung sasaran pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang ditetapkan melalui RKP BKKBN Pusat melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara dan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi Program Keluarga Berencana sebagai Program Nasional sehingga kebijakan nasional yang diarahkan dan berkaitan dengan tugas pokok dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan utama meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Tugas dan kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan dengan melakukan kemitraan dengan semua elemen baik TNI, POLRI, PKK dan Masyarakat termasuk dengan lembaga pemberdayaan masyarakat. Pengembangan jaringan pelayanan ditujukan untuk mempercepat proses perubahan pandangan, sikap dan perilaku masyarakat yang positif terhadap program Bangga Kencana, yang selanjutnya harus diikuti dengan penyiapan sarana pelayanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Penyiapan dan pelaksanaan Program Bangga Kencana ditujukan untuk memberikan pelayanan prima di bidang Kesejahteraan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baik dari segi kuantitas maupun dari segi peningkatan kualitas pelayanan serta pemerataan pelaksanaan program Bangga Kencana. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus memenuhi standar yang telah ditetapkan baik pelayanan bersifat subsidi maupun mandiri dengan sesuai kemampuan masyarakat dan mudah dijangkau. Mantapnya mekanisme operasional yang didukung sistem pencatatan dan pelaporan secara akurat dengan Sumber Daya Manusia yang handal akan mempercepat perwujudan visi dan Misi Kabupaten Minahasa.

Sasaran Strategis Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024, serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh

Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2022 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2022 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 8,6 persen pada tahun 2022 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
4. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024.
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2022 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
6. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2020-2024 Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan pemetaan atas kesesuaian Program dan Kegiatan Prioritas (termasuk Sasaran Strategis, Outcome, dan Output) seluruh K/L terhadap Janji Presiden yang harus diimplementasikan selama periode 5 (lima) tahun kedepan, serta memberikan arahan agar berbagai Program/Kegiatan Prioritas yang disusun oleh K/L sesuai dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024. Terkait dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), secara umum BKKBN berkontribusi langsung terhadap upaya pencapaian Janji Presiden dalam hal:

1. Pembangunan Keluarga

BKKBN tetap dalam lingkup Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, mendukung sepenuhnya upaya pencapaian Janji Presiden terkait “Meningkatkan keterlibatan perempuan/ibu dalam menjaga tumbuh kembang anak serta pendidikan karakter dalam keluarga” dan “Revolusi Mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antar warga”. Terutama dalam pengembangan kegiatan prioritas dalam penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini, serta pengembangan kegiatan terkait Revolusi Mental dalam sistem sosial untuk penguatan ketahanan keluarga dan masyarakat.

2. Kependudukan

Pembangunan Kependudukan terkait langsung dengan Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia dan dalam lingkup Janji Presiden untuk “Memantapkan Reformasi Sistem Kependudukan Nasional”. Dalam hal ini BKKBN mendukung sepenuhnya Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2020-2024 dalam Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Sosial, terutama dalam upaya “Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan”.

3. Keluarga Berencana (KB)

Program Keluarga Berencana (KB) terkait langsung dengan Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia dan dalam lingkup Janji Presiden untuk “Meningkatkan akses perempuan/ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesehatan reproduksi, terutama untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). BKKBN Rencana Strategis BKKBN 2020-2024 mendukung Arah Kebijakan dan Strategi pada Rancangan RPJMN 2020-2024 dalam upaya “Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Berdasarkan RPD Kabupaten Minahasa tahun 2024-2026, maka visi misi Kabupaten Minahasa adalah :

Visi : **“Minahasa yang Mandiri dan Sejahtera”**

Misi :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju dan mampu mandiri dengan budaya Si Tou Timou Tumou Tou;
2. Mewujudkan Minahasa yang mampu berkompetisi dan tetap mempertahankan budaya mapalus;
3. Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip HAM, Demokrasi, Supremasi dan Kepastian Hukum;
4. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agar berkelanjutan; dan
5. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan Makmur.

Untuk pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Minahasa, Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Berpedoman pada Misi 1(Satu) dan Misi 3(Tiga) maka disusun tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

Tujuan 1(satu) : Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas

Sasaran 1.1: Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk

1. Mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan

Sasaran 1.2: Meningkatkan pembinaan keluarga berencana

2. Meningkatkan avokasi, komunikasi informasi edukasi (KIE) serta kualitas tenaga penyuluh lapangan

3. Meningkatkan akses pelayanan KB yang merata dan berkualitas

Sasaran 1.3: Meningkatkan Pemberdayaan keluarga sejahtera

1. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Tujuan 2 (Dua) : Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM aparatur yang berkinerja tinggi

Sasaran 2.1 : Meningkatkan kualitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bersih, akuntabel dan profesional

1. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi yang efektif dan efisien

Secara umum sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024 – 2026 adalah terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggung jawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sasaran khusus yang ingin dicapai sebagai berikut: Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi dan dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas. Terciptanya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan ,profesional dan akuntabel.

2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.016.001.000,00						2.016.601.000,00
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
					Nilai IKM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	35 Orang/bulan	100 %	2.011.501.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	2.011.501.000,00	
2	14	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
					Nilai IKM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	1 Laporan	100 %	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.700.000,00	
2	14	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
					Nilai IKM	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	4 Laporan	100 %	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	1.700.000,00	
2	14	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
					Nilai IKM	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	1 Dokumen	100 %	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.700.000,00	
2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.100.000,00						1.100.000,00
2	14	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD												
					Nilai IKM	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Barang Milik Daerah yang Teradministrasi	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	1 Dokumen	94 %	500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	500.000,00	
2	14	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD												

					Nilai IKM	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Barang Milik Daerah yang Teradministrasi	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	4 Laporan	94 %	600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	600.000,00		
2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							20.000.000,00					23.000.000,00	
2	14	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
					Nilai IKM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terasilitasi	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	1 Paket	100 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	23.000.000,00		
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							73.025.659,00					75.084.159,00	
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
					Nilai IKM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum yang Terasilitasi	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	12 Paket	100 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.300.000,00		
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
					Nilai IKM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum yang Terasilitasi	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	12 Paket	100 %	19.025.659,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.084.159,00		
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
					Nilai IKM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum yang Terasilitasi	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	12 Paket	100 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	1.200.000,00		
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
					Nilai IKM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum yang Terasilitasi	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	12 Paket	100 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1.200.000,00		
2	14	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
					Nilai IKM	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Administrasi Umum yang Terasilitasi	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	1 Laporan	100 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.300.000,00		

					Nilai IKM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBMMD	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	1 Unit	94 %	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	7.000.000,00		
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
					Nilai IKM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBMMD	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	4 Unit	94 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	23.200.000,00		
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								410.000.000,00						500.000.000,00
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								45.000.000,00						50.000.000,00
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK														
					Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK yang di-Perdakan	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61 Nilai	12 Laporan	1 Dokumen	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	50.000.000,00		
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								365.000.000,00						450.000.000,00
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga														
					Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61 Nilai	12 Laporan	24 Angka	100.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	130.000.000,00		
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
					Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61 Nilai	12 Laporan	24 Angka	90.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	125.000.000,00		

2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB											
					Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61 Nilai	1 Dokumen	24 Angka	150.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	165.000.000,00
2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK											
					Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61 Nilai	1 Laporan	24 Angka	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	1 Laporan	30.000.000,00
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						5.169.037.873,00					5.502.021.500,00
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						1.695.000.000,00					1.860.000.000,00
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja											
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	6 Organisasi	6 Dokumen	100.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	6 Organisasi	120.000.000,00
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal											
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	1 Dokumen	6 Dokumen	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	30.000.000,00
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK											

						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPk	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa-Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	1 Unit	6 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Unit	15.000.000,00				
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																	
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPk	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	1 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	130.000.000,00				
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPk Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																	
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPk	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	25 Laporan	6 Dokumen	510.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	25 Laporan	535.000.000,00				
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPk																	

					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPk	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	25 Laporan	6 Dokumen	850.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	25 Laporan	900.000.000,00			
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPk															
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPk	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPk	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa-Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	12 Laporan	6 Dokumen	100.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPk	12 Laporan	130.000.000,00			
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)										1.591.000.000,00					1.622.000.000,00
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPk di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB															
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPk (advokasi dan KIE)	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	25 Organisasi	13 %	250.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	25 Organisasi	270.000.000,00			
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB															
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPk (advokasi dan KIE)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	3 Unit	13 %	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	3 Unit	36.000.000,00			
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)															

					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	1 Laporan	13 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	20.000.000,00		
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)													
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa-Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	1470 Orang	13 %	1.296.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1470 Orang	1.296.000.000,00		
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							635.888.000,00					717.438.000,00	
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya													
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	12 Laporan	60 Persen	35.150.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	45.000.000,00		
2	14	03	2.03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB													

					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	2 Orang	60 Persen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Orang	15.000.000,00			
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)															
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	1593 Orang	60 Persen	359.238.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1593 Orang	369.438.000,00			
2	14	03	2.03	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP															
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kab. Minahasa, Lembean Timur, Semua Kel/Desa	15 %	1 Laporan	60 Persen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan	15.000.000,00			
2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB															
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	1 Dokumen	60 Persen	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Dokumen	2.000.000,00			
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB															
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	3 Unit	60 Persen	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	3 Unit	35.000.000,00			
2	14	03	2.03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB															

					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	68 Orang	60 Persen	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	68 Orang	30.000.000,00
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya												
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	1 Laporan	60 Persen	25.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	35.000.000,00
2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan												
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	100 Orang	60 Persen	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	100 Orang	30.000.000,00
2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi												
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	68 Orang	60 Persen	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	68 Orang	70.000.000,00
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak												

						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	1 Laporan	60 Persen	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	25.000.000,00				
2	14	03	2.03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran																	
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	50 Orang	60 Persen	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	50 Orang	25.000.000,00				
2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria																	
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	30 Orang	60 Persen	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	30 Orang	21.000.000,00				
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB									1.247.149.873,00						1.302.583.500,00		
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB																	
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Organisasi yang Mendapat Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	68 Organisasi	5 Angka	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Organisasi yang Mendapat Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	68 Organisasi	30.000.000,00				
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																	
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	1 Dokumen	5 Angka	300.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	323.800.000,00				
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB																	

						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPk yang efektif	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	45 Kampung	5 Angka	798.749.873,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	45 Kampung	798.783.500,00		
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB															
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPk yang efektif	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	1 Laporan	5 Angka	123.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan	150.000.000,00		
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)										2.144.692.127,00					2.197.000.000,00
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										2.119.692.127,00					2.170.000.000,00
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)															
						Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 %	15 Unit	90,5 %	200.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	15 Unit	220.000.000,00		
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)															
						Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 %	810 Orang	90,5 %	1.919.692.127,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	810 Orang	1.950.000.000,00		

2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						25.000.000,00					27.000.000,00
2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)											
					Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Median Usia kawin pertama(MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 %	25 Organisasi	22 Tahun	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	25 Organisasi	27.000.000,00
TOTAL											9.986.806.659,00					10.486.806.659,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Minahasa merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga sebagaimana tercantum dalam RPD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Rencana Pembangunan Daerah 2024–2026 dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Minahasa 2024 dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan untuk mewujudkan pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam renja 2023 dan kebijakan umum APBD. Prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh satker mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan.

Pelaksanaan Kegiatan renja harus dilakukan secara efektif dan efisien, untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar perangkat daerah dengan kabupaten/kota maupun perangkat daerah dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah di programkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luar dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan factor terpenting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana program maupun kegiatan Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2024 berisi program dan kegiatan baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah didukung oleh pendanaan(pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan sebagai instrument pelaksanaan dari program perangkat daerah tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 disajikan pada table 4.1 diatas. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan RKPD tahun 2024 yang sudah ditetapkan.

Tabel 4.1
Rencana kerja dan pendanaan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					9.243.624.890				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					9.243.624.890				
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					9.243.624.890				
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.263.076.659,00				
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					9.000.000,00				
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang ditetapkan	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	5 Dokumen	9 Dokemen	3.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang ditetapkan	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	4 Laporan	9 Dokemen	1.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang ditetapkan	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	4 Nilai	1 Laporan	9 Dokemen	1.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1.778.773.599	
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	4 Nilai	35 Orang/bulan	100 %	1.757.974.890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	4 Nilai	1 Laporan	100 %	70000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	4 Nilai	4 Laporan	100 %	70000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							70000	
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	4 Nilai	1 Dokumen	100 %	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					140000			
2	14	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Barang Milik Daerah yang Teradministrasi	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	1 Dokumen	94 %	70000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Barang Milik Daerah yang Teradministrasi	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	4 Laporan	94 %	70000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2	14	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terfasilitasi	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	1 Paket	100 %		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					34.612.000			
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	12 Paket	100 %	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	12 Paket	100 %	10000000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	12 Paket	100 %		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	12 Paket	100 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	1 Laporan	100 %	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	12 Laporan	100 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						18.499.000		
2	14	01	2.07	05	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	10 Unit	94 %		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	14	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	24 Unit	94 %	18.499.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						113.600000			
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	1 Laporan	99 %	5000000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	12 Laporan	99 %	12.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	12 Laporan	99 %	96.000000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								20.080.000	
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBM	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Nilai	1 Unit	94 %	11.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBM	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	4 Nilai	4 Unit	94 %	9000000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							397.500.000	
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK								
					Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK yang di-Perdakan	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	61 Nilai	12 Laporan	1 Dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							397.500.000	
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga								
					Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	61 Nilai	12 Laporan	24 Angka	60.000000	DAK Non Fisik-BOKB-KB
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga								
					Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	61 Nilai	12 Laporan	24 Angka	217.500.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB								

						Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61 Nilai	1 Dokumen	24 Angka	120.000.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK										
						Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61 Nilai	1 Laporan	24 Angka		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								4.874.499.000		
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								1.847.000.000		
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja										
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	6 Organisasi	6 Dokumen		DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal										

						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	1 Dokumen	6 Dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK										
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	1 Unit	6 Dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang										
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	1 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)										

					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	25 Laporan	6 Dokumen	375.000.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK								
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	25 Laporan	6 Dokumen	1.092.000.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK								
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	12 Laporan	6 Dokumen	80.000.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							810.000.000	
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB								

						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBP (advokasi dan KIE)	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	25 Organisasi	13 %	810.000.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB										
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBP (advokasi dan KIE)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	3 Unit	13 %		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBP untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)										
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBP (advokasi dan KIE)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	1 Laporan	13 %		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)										

					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBP (advokasi dan KIE)	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	1470 Orang	13 %	810.000.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							1.505.249.000			
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya										
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	12 Laporan	60 Persen	59.400.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		
2	14	03	2.03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB										
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	2 Orang	60 Persen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)										

						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	15 %	1593 Orang	60 Persen	444.320.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2	14	03	2.03	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP										
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kab. Minahasa, Lembean Timur, Semua Kel/Desa	15 %	1 Laporan	60 Persen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB										
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	15 %	1 Dokumen	60 Persen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB										
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	15 %	3 Unit	60 Persen	962.829.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	03	2.03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB										

					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	15 %	68 Orang	60 Persen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	15 %	1 Laporan	60 Persen	38.700.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan									
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	15 %	100 Orang	60 Persen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi									
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	15 %	68 Orang	60 Persen	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak									

						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	1 Laporan	60 Persen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	03	2.03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran										
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	50 Orang	60 Persen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria										
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	30 Orang	60 Persen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB									712.250.000	
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB										
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	68 Organisasi	5 Angka		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB										

					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPk yang efektif	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	1 Dokumen	5 Angka	3.750.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPk di Kampung KB								
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPk yang efektif	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	45 Kampung	5 Angka	706.5000.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB								
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPk yang efektif	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	1 Laporan	5 Angka		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							2.026.160.000	
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							2.001.000.000	
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)							300.000.000	

					Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 %	15 Unit	90,5 %		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								
					Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 %	810 Orang	90,5 %	1.701.000.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							25.160.000,00	
2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								
					Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Median Usia kawin pertama(MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun	- Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 %	25 Organisasi	22 Tahun	25.160.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL											9.243.624.890		

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupten Minahasa Tahun 2024 ini disusun sebagai pedoman kerja yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan, dan disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupten Minahasa 2024 – 2026. Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan akan lebih mudah untuk dapat mengendalikan Pelaksanaan Pembangunan, Khususnya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa tahun 2023 merupakan Rencana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melanjutkan RENSTRA DPPKB Tahun 2024-2026 serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa. Rencana Kerja Tahun 2024 dimaksudkan guna mewujudkan visi, misi, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupten Minahasa Tahun 2024 sesuai dengan Renstra Tahun 2024-2026.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupten Minahasa Tahun 2024 kami susun untuk dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam upaya pengambilan kebijakan serta sebagai bahan acuan kami untuk program kegiatan di tahun 2024. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa diharapkan prioritas pembangunan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sebagai penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Minahasa dapat lebih sinergis dan optimal dalam mencapai sasaran yang telah direncanakan.

Semoga upaya – upaya kita dalam meningkatkan kinerja untuk ikut membangun bangsa dan negara, khususnya pemerintah Kabupaten Minahasa dapat terlaksana dengan segala baik.

Kepala Dinas

**Dra. MARTHA M. AGUW
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680501 199703 2 009**